



PERWAKILAN ACEH



**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024**

**PERWAKILAN BPKP ACEH**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN ACEH**

بادن فعوا اسن كأولئمن دان فمبائونن فروا كيلن أحيه

Jalan Tengku Panglima Nyak Makam Banda Aceh 23118  
Telepon (0651) 28133, 28134, dan 28183, Faksimile (0651) 28173

---

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024**

Dalam memastikan terwujudnya target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Aceh yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2024, Perwakilan BPKP Aceh telah menyusun rencana aksi kinerja sebagai salah satu sarana pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi.

Rencana Aksi Kinerja akan dipedomani oleh seluruh pegawai sebagai:

1. Media untuk membangun komitmen dalam mencapai kinerja yang diharapkan dan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pegawai;
2. Arah kebijakan dan strategi bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja serta sebagai dasar kolaborasi pelaksanaan kegiatan dan sinergi dengan mitra kerja;
3. Sarana untuk monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja.

Rencana aksi telah memperhatikan pencapaian target kinerja pelaksanaan beberapa kegiatan yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan risiko dari setiap kegiatan utama sehingga diharapkan tidak mengganggu pencapaian target kinerja masing-masing yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Banda Aceh, 20 Maret 2024  
Kepala Perwakilan BPKP Aceh,

*Ditandatangani secara elektronik oleh:*

Supriyadi

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024  
PERWAKILAN BPKP ACEH**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2024	Target Kinerja (TW)				Kegiatan Pengawasan/ Dukungan Manajemen	Risiko Utama (Nilai Risiko)	Anggaran Pengawasan	Anggaran Alat Tulis Kantor	PIC Eselon III	Satuan	Target Kegiatan (TW)					
				I	II	III	IV							I	II	III	IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
1 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1	Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi	Rp (Juta)	383	-	-	-	383	Pengawasan atas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD)	Hasil Kegiatan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) tidak dapat ditindaklanjuti	16	99.251.000,00	6.204.000,00	Korwas JFA Bidang APD 1 dan APD 2	LHP	-	-	-	3
	1.2	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah																	
	1.2.1	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara	Rp (Juta)	2.000	-	-	-	2.000	Audit Tujuan Tertentu, Evaluasi, Monitoring, Reviu	Anggaran pengawasan ( <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> ) belum sesuai kebutuhan	17	1.662.030.971,00	137.487.000,00	Korwas JFA Bidang IPP	LHP	12	47	15	30
	1.2.2	Nilai Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah	Rp (Juta)	109.062	-	-	-	109.062	Audit Tujuan Tertentu, Evaluasi, Monitoring, Reviu	Anggaran pengawasan ( <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> ) belum sesuai kebutuhan	17	671.796.295,00	43.719.000,00	Korwas JFA Bidang APD 1 dan APD 2	LHP	25	8	9	21
	1.2.3	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara	Rp (Juta)	-	-	-	-	-	Audit Tujuan Tertentu, Evaluasi, Monitoring, Reviu	Anggaran pengawasan ( <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> ) belum sesuai kebutuhan	17	7.475.000,00	467.000,00	Korwas JFA Bidang Akuntan Negara	LHP	-	1	-	-
	1.2.4	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara	Rp (Juta)	1.877	-	-	-	1.877	Audit Tujuan Tertentu, Evaluasi, Monitoring, Reviu	Anggaran pengawasan ( <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> ) belum sesuai kebutuhan	17	222.186.000,00	14.031.000,00	Korwas JFA Bidang Investigasi	LHP	1	-	15	1
	1.3	Nilai penyelamatan keuangan Negara																	
	1.3.1	Nilai penyelamatan keuangan Negara	Rp (Juta)	-	-	-	-	-	Audit Investigasi (AI), Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), Pemberian Keterangan Ahli (PKA)	Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi teknis/kuantitas pada kontrak	22	-	-	Korwas JFA Bidang IPP	LHP	-	-	-	-
	1.3.2	Nilai penyelamatan keuangan Negara	Rp (Juta)	187,30	-	-	-	187	Audit Investigasi (AI), Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), Pemberian Keterangan Ahli (PKA)	Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi teknis/kuantitas pada kontrak	22	-	-	Korwas JFA Bidang APD 1 dan APD 2	LHP	-	-	-	-
	1.3.2	Nilai penyelamatan keuangan Negara	Rp (Juta)	-	-	-	-	-	Audit Investigasi (AI), Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), Pemberian Keterangan Ahli (PKA)	Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi teknis/kuantitas pada kontrak	22	-	-	Korwas JFA Bidang Akuntan Negara	LHP	-	-	-	-
1.3.2	Nilai penyelamatan keuangan Negara	Rp (Juta)	51.982	-	-	-	51.982	Audit Investigasi (AI), Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), Pemberian Keterangan Ahli (PKA)	Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi teknis/kuantitas pada kontrak	22	-	-	Korwas JFA Bidang Investigasi	LHP	-	-	-	-	
<b>Jumlah Anggaran Sasaran Kegiatan 1</b>										<b>2.662.739.266,00</b>	<b>201.908.000,00</b>								
2 Meningkatkan Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	2.1	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	Persen (%)	80	-	-	-	80	Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan tidak komprehensif/holistis	17	-	-	Korwas JFA Bidang IPP, APD, AN dan Investigasi	LHP	-	-	-	-
<b>Jumlah Anggaran Sasaran Kegiatan 2</b>										<b>-</b>	<b>-</b>								
3 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	3.1	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target																	
	3.1.1	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	PSN	2	-	-	-	2	Pengawasan atas Proyek Strategis Nasional	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP	20	65.359.029,00	4.085.000,00	Korwas JFA Bidang IPP	LHP	4	4	6	4
	3.1.2	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	PSN	-	-	-	-	-	Pengawasan atas Proyek Strategis Nasional	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP	20	3.631.000,00	227.000,00	Korwas JFA Bidang APD 1 dan APD 2	LHP	-	-	-	1
	3.1.3	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	PSN	1	-	-	-	1	Pengawasan atas Proyek Strategis Nasional	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP	20	61.728.000,00	3.859.000,00	Korwas JFA Bidang Akuntan Negara	LHP	4	5	4	4
	3.2	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen (%)	85	-	-	-	85	Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan	Rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan tidak komprehensif/holistis	17	71.076.000,00	6.175.000,00	Korwas JFA Bidang Investigasi	LHP	3	3	3	3
<b>Jumlah Anggaran Sasaran Kegiatan 3</b>										<b>201.794.029,00</b>	<b>14.346.000,00</b>								
4 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	4.1	Jumlah BUMD dengan Pengelolaan Korporasinya Baik	BUMD	1	-	-	-	1	Pengawasan atas Akuntabilitas Tata Kelola BUMD BPD, Jasa Air dan Aneka Usaha	Tim gagal memperoleh data yang dibutuhkan	13	94.804.666,00	6.503.000,00	Korwas JFA Bidang Akuntan Negara	LHP	-	-	28	4

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024**  
**PERWAKILAN BPKP ACEH**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2024	Target Kinerja (TW)				Kegiatan Pengawasan/ Dukungan Manajemen	Risiko Utama (Nilai Risiko)	Anggaran Pengawasan	Anggaran Alat Tulis Kantor	PIC Eselon III	Satuan	Target Kegiatan (TW)						
				I	II	III	IV							I	II	III	IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
	4.2	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	8	-	-	-	8	Pengawasan atas Akuntabilitas Tata Kelola BUMD BPD, Jasa Air dan Aneka Usaha	Tim gagal memperoleh data yang dibutuhkan	13	-	-	Korwas JFA Bidang Akuntan Negara	LHP	-	-	-		
	4.3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	3	-	-	-	3	Pengawasan terhadap Akuntabilitas Tata Kelola BLU dan BLUD	SDM yang ada belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan	11	63.258.630,00	3.953.000,00	Korwas JFA Bidang Akuntan	LHP	-	-	4		
	4.4	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	558	-	-	-	558	Pengawasan atas Akuntabilitas dan Tata Kelola Keuangan BUMDesa	Tim yang akan ditugaskan tidak tersedia	16	106.660.494,00	6.667.000,00	Korwas JFA Bidang Akuntan	LHP	-	-	50		
	4.5	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	2	-	-	-	2	Pengawasan atas Akuntabilitas dan Tata Kelola Keuangan BUMDesa	Hasil Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak diimplementasikan oleh mitra kerja (stakeholder)	11	-	-	Korwas JFA Bidang Akuntan Negara	LHP	-	-	-		
<b>Jumlah Anggaran Sasaran Kegiatan 4</b>										<b>264.723.790,00</b>	<b>17.123.000,00</b>									
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	5.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen (%)	100	-	-	-	100	Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan dalam bentuk Audit Investigasi, PKKN, dan PKA	Terjadinya kesalahan menentukan jumlah klaim/eskalasi/kerugian keuangan negara	20	355.737.000,00	23.243.000,00	Korwas JFA Bidang Investigasi	LHP	1	3	-	22
		5.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen (%)	90	-	-	-	90	Pencegahan Kecurangan, Deteksi Kecurangan, Respon Kecurangan	Penugasan pengawasan intern tidak dapat dilakukan	7	-	-	Korwas JFA Bidang Investigasi	LHP	-	-	-	-
		5.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	4	-	-	-	4	Sosialisasi Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Penugasan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) tidak diselesaikan	11	-	-	Korwas JFA Bidang Investigasi	LHP	-	-	-	-
		5.4	Jumlah Pemda menindak lanjuti Area Of Improvement dari hasil pengukuran EPK	Pemda	2	-	-	-	2	Sosialisasi Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Penugasan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) tidak diselesaikan	11	-	-	Korwas JFA Bidang Investigasi	LHP	-	-	-	-
<b>Jumlah Anggaran Sasaran Kegiatan 5</b>										<b>355.737.000,00</b>	<b>23.243.000,00</b>									
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/LP/BU	6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	Provinsi	1	1	1	1	1	Pengawasan atas Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda dan Pembinaan Pengelolaan JFA oleh APIP Daerah	Komitmen Kepala Daerah dan/atau Pimpinan APIP masih kurang dalam hal peningkatan kapabilitas APIP	25	417.375.000,00	26.375.000,00	Korwas JFA Bidang P3A	LHP	24	15	-	46
		6.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	Kab/kota	23	17	17	17	23	Pengawasan atas Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda dan Pembinaan Pengelolaan JFA oleh APIP Daerah	Komitmen Kepala Daerah dan/atau Pimpinan APIP masih kurang dalam hal peningkatan kapabilitas APIP	25	-	-	Korwas JFA Bidang P3A	LHP	-	-	-	-
		6.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Provinsi	1	1	1	1	1	Pengawasan atas Maturitas SPIP/MRI Pemerintah Daerah	Pengumpulan bukti pemenuhan unsur maturitas SPIP tidak optimal	17	156.160.000,00	9.761.000,00	Korwas JFA Bidang APD 1 dan APD 2	LHP	25	-	-	25
		6.4	Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Kab/kota	23	18	18	18	23	Pengawasan atas Maturitas SPIP/MRI Pemerintah Daerah	Pengumpulan bukti pemenuhan unsur maturitas SPIP tidak optimal	17	-	-	Korwas JFA Bidang APD 1 dan APD 2	LHP	-	-	-	-
		6.5	Jumlah Provinsi dengan MRI ≥ Level 3	Provinsi	1	3	3	3	1	Pengawasan atas Maturitas SPIP/MRI Pemerintah Daerah	Pengumpulan bukti pemenuhan unsur maturitas SPIP tidak optimal	17	-	-	Korwas JFA Bidang APD 1 dan APD 2	LHP	-	-	-	-
		6.6	Jumlah Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3	Kab/kota	8	-	-	-	8	Pengawasan atas Maturitas SPIP/MRI Pemerintah Daerah	Pengumpulan bukti pemenuhan unsur maturitas SPIP tidak optimal	17	-	-	Korwas JFA Bidang APD 1 dan APD 2	LHP	-	-	-	-
		6.7	Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	Pemda	7	-	-	-	7	Pengawasan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah (SAKIP) (D301)	Stakeholder tidak siap	19	5.922.941,00	514.000,00	Korwas JFA Bidang APD 1 dan APD 2	LHP	1	-	-	-

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024  
PERWAKILAN BPKP ACEH**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2024	Target Kinerja (TW)				Kegiatan Pengawasan/ Dukungan Manajemen	Risiko Utama (Nilai Risiko)	Anggaran Pengawasan	Anggaran Alat Tulis Kantor	PIC Eselon III	Satuan	Target Kegiatan (TW)					
				I	II	III	IV							I	II	III	IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
	6.8	Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel	Desa	3.898	-	-	-	3.898	Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Desa	Hasil Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak diimplementasikan oleh mitra kerja (stakeholder)	11	196.732.764,00	2.058.000,00	Korwas JFA Bidang APD 1 dan APD 2	LHP	-	-	-	5
	6.9	Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai	Desa	1.333	-	-	-	1.333	Pengawasan atas Akuntabilitas Aset Desa	Terdapat aset tetap yang belum diinventarisasi	11	-	-	Korwas JFA Bidang APD 1 dan APD 2	LHP	-	-	-	-
	6.10	Jumlah BUMD dengan MRI >= Level 3	BUMD	3	-	-	-	3	Pengawasan atas Manajemen Risiko Badan Usaha dan Badan Layanan	Stakeholder tidak siap	19	200.622.210,00	12.540.000,00	Korwas JFA Bidang Akuntan	LHP	-	-	1	10
	6.11	Jumlah BLU/D dengan MRI >= Level 3	BLU/D	3	-	-	-	3	Pengawasan atas Manajemen Risiko Badan Usaha dan Badan Layanan	Stakeholder tidak siap	19	-	-	Korwas JFA Bidang Akuntan Negara	LHP	-	-	-	-
	6.12	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	BUMD	1	-	-	-	1	Pengawasan atas Manajemen Risiko Badan Usaha dan Badan Layanan	Stakeholder tidak siap	19	-	-	Korwas JFA Bidang Akuntan Negara	LHP	-	-	-	-
	6.13	Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	BLU/D	1	-	-	-	1	Pengawasan atas Manajemen Risiko Badan Usaha dan Badan Layanan	Stakeholder tidak siap	19	-	-	Korwas JFA Bidang Akuntan Negara	LHP	-	-	-	-
<b>Jumlah Anggaran Sasaran Kegiatan 6</b>										<b>976.812.915,00</b>	<b>51.248.000,00</b>								
<b>Jumlah Total Anggaran Pengawasan dan ATK</b>											<b>4.769.675.000,00</b>								
7	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	7.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75	-	-	-	75	Penilaian Mandiri (Self Assesment) dan Evaluasi Penerapan Zona Integritas	Dokumentasi Pemenuhan ZI tidak lengkap	14		Kabag Umum	Laporan				1
		7.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82	-	-	-	82	Penilaian Mandiri (Self Assesment) dan Evaluasi Penerapan SAKIP	Dokumentasi pemenuhan evaluasi SAKIP tidak lengkap	7		Korwas JFA Bidang P3A	Laporan			1	
		7.3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	Persen (%)	70	-	-	-	70	Laporan MRI Triwulan	Tidak dilakukan pendokumentasian, pemantauan, dan pengukuran perkembangan/progres penyelenggaraan SPIP	17		Kabag Umum	Laporan	1	1	1	1
		7.4	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen (%)	100	100	100	100	100	Laporan MRI Triwulan	Terlambatnya penyelesaian Rencana Tindak Pengendalian yang telah direncanakan dan disepakati Pemilik Risiko	7	24.209.960.000,00	Korwas JFA Bidang P3A	Laporan	1	1	1	1
		7.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75	-	-	-	75	Survei Kepuasan kepada para stakeholders BPKP Aceh	SDM yang ada belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan	11		Kabag Umum	Laporan			1	1
		7.6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95	95	95	95	95	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	Revisi anggaran terlalu sering	16		Kabag Umum	Laporan	1	1	1	1
		7.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80	-	-	-	80	Penghapusan BMN rusak berat, Pelaporan Belanja Modal, Rekonsiliasi BMN, Updating Kondisi BMN	Sarana dan Prasarana kurang memadai untuk menunjang kegiatan pengawasan dan operasional	16		Kabag Umum	Laporan	1	1	1	1
<b>Jumlah Anggaran Tata Kelola Unit Kerja</b>											<b>24.209.960.000,00</b>								
<b>Jumlah Total Anggaran</b>											<b>28.979.635.000,00</b>								

**Banda Aceh, 20 Maret 2024  
Kepala Perwakilan**

*Ditandatangani secara elektronik oleh:*

**Supriyadi**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN ACEH**

Jalan Tgk. Panglima Nyak Makam, Banda Aceh 23118  
Telepon (0651) 28133, 28134 dan 28183, Faks. 28173